

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Data yang relevan dari penelitian sebelumnya digunakan dalam penyelidikan ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan (W. Putri & Arza, 2019) digunakan sampel sebanyak 57 LKPD kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, umur, jumlah SKPD, tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian keuangan, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib yang diwajibkan dalam pelaporan keuangannya. Sebaliknya, tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kekayaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti & Misran, 2021) bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel ketergantungan daerah, kekayaan daerah, belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat wajib pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam variabel ketergantungan daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel seperti kekayaan daerah, belanja daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan (Haryanto et al., 2023) menggunakan analisis statistik deskriptif dengan sampel sebanyak 175 laporan hasil pemeriksaan atas

LKPD dari 35 provinsi dalam lima tahun anggaran 2016 hingga 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti ketergantungan daerah, total aset, belanja modal, jumlah penduduk, dan belanja pegawai mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, variabel sumber kekayaan daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Agensi**

Menurut (Scott, 2015) teori keagenan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mempelajari hubungan dan dinamika antara dua organisasi yang disebut "*principal*" dan "*agent*" dalam konteks ini agen yang bertindak atas nama prinsipal. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, teori keagenan sering digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal (rakyat) yang memberi perintah dan agen (pemerintah) yang bertugas melaksanakan kebijakan dan rencana pemerintah. Teori keagenan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ketidakcukupan informasi yang sering terjadi ketika prinsipal berinteraksi dengan agen (Widanti, 2019).

Masalah muncul dalam hubungan keagenan ketika hanya satu pihak saja yang mempunyai akses terhadap informasi lebih luas dibandingkan pihak lain. Persoalan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana prinsipal dapat memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berkaitan dengan penerapan teori keagenan dalam pemerintah, ditegaskan bahwa pemerintah

daerah sebagai agen seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi kebijakan dan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai situasi perekonomian pemerintah daerah dibandingkan dengan masyarakat umum (Widanti, 2019). Laporan keuangan berfungsi sebagai bukti kinerja yang telah dilaporkan agen kepada prinsipal. Dalam situasi ini, prinsipal (rakyat) harus melakukan pengawasan kepada agen sehingga pemerintah daerah terdorong untuk menyampaikan informasi secara transparan dan sesuai dengan peraturan. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat mengevaluasi dan menelusuri efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan daerah (W. Putri & Arza, 2019).

### **2.2.2 Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah dan sejauh mana sumber daya publik telah dimanfaatkan. Laporan keuangan harus mematuhi semua peraturan yang mengatur pengungkapan informasi keuangan. Keterbukaan informasi atau transparansi, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengungkapan laporan keuangan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pengungkapan laporan keuangan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam hal penyampaian informasi keuangan.

Pengungkapan (*disclosure*) dalam arti luas berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, ketika menyampaikan maksud penjelasan yang memadai dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam pemerintah daerah. Menurut

(PP Nomor 71, 2010) Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan sebagai landasan pengungkapan informasi keuangan secara lengkap. Pengungkapan wajib adalah semua informasi yang harus disampaikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Hendriyani & Tahar, 2015). Dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, pengungkapan wajib ini mengacu pada penyampaian informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi (SAP).

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, terdapat beberapa komponen yang dianggap penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Komponen-komponen tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.

### **2.2.3 Kemandirian Pemerintah Daerah**

Kemandirian pemerintah daerah mencerminkan tingkat otonomi dan wewenang yang dimiliki suatu daerah dalam mengelola kebijakan dan keuangan pemerintah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. (Finakesti et al., 2022) berpendapat bahwa tingkat kemandirian dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendanai sendiri aktivitas pemerintahannya, termasuk dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa daerah mungkin mempunyai tingkat kemandirian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Kemandirian yang tinggi dapat mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan di website pemerintah daerah sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sebab apabila suatu daerah dianggap sebagai daerah yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, maka daerah itu akan melakukan pengungkapannya dengan baik sebagai wujud transparansi (Murni et

al., 2017). Seiring dengan tingkat kemandirian yang semakin tinggi, maka cenderung semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendanaan dari luar, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan daerah menjadi lebih tinggi (Utami & Sulardi, 2020). Dengan kata lain, meningkatnya tingkat kemandirian pemerintah daerah akan cenderung berdampak pada peningkatan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

#### **2.2.4 Kekayaan Pemerintah Daerah**

Kekayaan pemerintah daerah mencakup sumber daya keuangan, aset, dan pendapatan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, termasuk pajak daerah, harta kekayaan, dana pemerintah pusat, dan sumber daya lainnya. Tingkat kekayaan daerah dapat tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mengindikasikan sejauh mana tingkat kemakmuran daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah, semakin besar juga partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (W. Putri & Arza, 2019).

Kekayaan daerah yang signifikan mencerminkan bahwa kinerja daerah tersebut semakin unggul (Finakesti et al., 2022). Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengeluarkan sumber daya yang ada di daerahnya guna dimanfaatkan untuk pemasukan daerah dan meningkatkan rasa kemasyarakatan di dalamnya. Pemerintah daerah dengan sumber daya keuangan lebih banyak cenderung menerapkan transparansi yang lebih ketat dalam pengelolaan data publik, termasuk pengungkapan informasi keuangan secara menyeluruh.

#### **2.2.5 Total Aset**

Menurut PP No. 71 tahun 2010, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan diinginkan dapat berguna di masa depan. Aset ini

dapat berupa sumber daya finansial maupun non-finansial yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik serta sumber daya yang dijaga karena peristiwa masa lampau. Pengelolaan aset dapat berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik (Teriyani et al., 2022). Kualitas pengungkapan laporan keuangan dapat dipengaruhi jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Semakin tinggi jumlah total aset, semakin kompleks pula rincian dan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Haryanto et al., 2023). Pengeluaran yang signifikan dalam pengadaan, pembelian, atau pengembangan aset akan menghasilkan lebih banyak kewajiban dalam pengungkapan informasi keuangan. Peningkatan belanja modal menimbulkan lebih besar tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dalam laporan keuangan, sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai penggunaan modal belanja menjadi lebih transparan (Haryanto et al., 2023).

#### **2.2.6 Umur Pemerintah Daerah**

Umur pemerintah daerah merujuk pada sejak kapan pemerintah daerah tersebut berdiri atau didirikan. Menurut (Simbolon & Kurniawan, 2018), pemerintah daerah dengan sejarah administrasi yang lebih panjang akan memiliki kelebihan pengetahuan dan sumber daya yang lebih besar dalam mengelola operasi keuangannya sesuai dengan SAP. Pemerintah daerah yang lebih matang mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dan pemahaman mengenai transparansi, sehingga dapat menghasilkan pengungkapan yang lebih baik (Widanti, 2019). Pemerintah daerah yang telah memiliki pengalaman yang lebih lama cenderung melakukan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembelajaran bagi pemerintah dalam mengembangkan perbaikan dan perkembangan pemerintahan ke depannya (Sabilla, 2020).

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penelitian yang dilakukan oleh (Herawati, 2018) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah yang tinggi memungkinkan suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif karena daerah tersebut mampu membiayai daerahnya sendiri. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan teori agensi, dimana prinsipal melakukan kepatuhan dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah (W. Putri & Arza, 2019). Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (pelaksana kerja) akan bertindak sesuai dengan tuntutan yang diberikan prinsipal.

Dalam penelitiannya (Finakesti et al., 2022) menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah berhubungan dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah tinggi suatu daerah cenderung berkontribusi pada kemampuan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Tingkat Kemandirian berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

### **2.3.2 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan lebih banyak pendapatan dan kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung pengungkapan lebih baik. (Finakesti et al., 2022) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Ini menandakan bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki akan semakin banyak sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan tingkat pengungkapan.

Kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi terkait pendapatan yang diperoleh (A. N. Putri et al., 2023). Konsep ini sesuai dengan teori agensi, di mana kekayaan pemerintah daerah merupakan PAD yang diperoleh melalui pajak dan retribusi daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka tuntutan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi kepada masyarakat secara transparan semakin tinggi pula. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

### **2.3.3 Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Merliani et al., 2018) menyatakan bahwa total aset memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil penelitian yang dilaksanakan (Haryanto et al., 2023) yang menyatakan

bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat apabila aset-aset penting tetap dipertahankan. (Salfadhilah et al., 2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa total aset memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan teori agensi dimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan aset yang dimiliki kepada pemerintah pusat, sehingga mampu melaksanakan tuntutannya dalam menyajikan pengungkapan secara transparan kepada publik. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Total Aset berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

#### **2.3.4 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah yang telah berdiri dalam jangka waktu yang lebih tua maka cenderung mempunyai sumber daya yang lebih banyak, termasuk tenaga kerja, dan sistem informasi. Semakin lama adanya pemerintah daerah atau agen, maka semakin memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam penyajian laporan keuangan kepada publik atau prinsipal. Menurut (Merliani et al., 2018) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan di daerahnya.

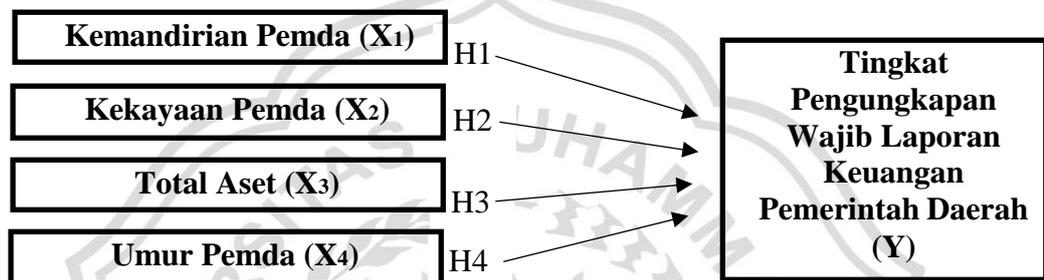
Terdapat perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya mengenai dampak umur pemerintah daerah pada tingkat pengungkapan LKPD. Namun, berdasarkan hasil penelitian oleh (Budiarto & Indarti, 2019), umur pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap keterbukaan informasi LKPD. Sesuai dengan teori agensi, salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah

melakukan pengungkapan kepada publik, sehingga publik dapat mengontrol dan melihat kinerja yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun. Maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Umur Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual